

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan pada berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan serta bidang lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan tersebut, negara memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, negara memerlukan sumber dana yang banyak dan salah satunya berasal dari pajak.

Sumber penerimaan pemerintah meliputi beberapa jenis, yaitu: Satu; Kekayaan negara (state asset); dengan catatan asset tersebut dijual atau disewakan kemudian hasil penjualan atau sewanya dimasukkan ke kas negara (privatisasi). Dua; Hutang; baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri (obligasi). Tiga; Hibah (grant), hibah yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Empat; Pencetakan uang (money creation), berkaitan dengan inflation tax, nilai riil dari pemungutan pajak. Lima; Penerimaan pajak dan pungutan-pungutan resmi yang lain. (Joko Waluyo, 2009)

Sektor perpajakan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang tidak bergerak sehingga yang dipentingkan adalah obyeknya. Keadaan atas status orang atau badan usaha yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985

tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan official assessment system. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan official assessment system dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB. (Koentarto, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang diperhitungkan dalam sisi penerimaan APBD selain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, bea cukai, pajak ekspor, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Hal ini merupakan suatu landasan yang baik bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber dana guna pembiayaan pembangunan di daerah masing – masing.

Berikut merupakan tabel data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019

Tabel 1. 1 Tabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Selisih
2018	26.000.000.000	26.909.314.060	103,50	909.314.060
2019	28.250.000.000	28.053.778.197	99,31	196.221.803

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Klaten, diolah.

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp. 1.144.464.137. Dapat dilihat bahwa realisasi yang didapatkan melebihi target yang diharapkan. Pada tahun 2018, selisih antara target dengan realisasi sebesar Rp. 909.314.060 dan tahun 2019 sebesar Rp. 196.221.803. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang baik akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut bisa mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam hal penarikan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Menurut Witiya dalam (Haris, 2018) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (1) SPPT tidak tersampai kepada wajib pajak, (2) Wajib pajak lupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena faktor kesibukan, (3) Isu pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (6) topografi wilayah, (7) data belum dientry, dan (8) tingkat pendapatan wajib pajak.

Menurut Septiany (dalam Haris, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul Fakotr-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

pada KKPPratama di Sleman menunjukkan bahwa jumlah objek pajak, luas tanah, luas bangunan, jumlah SPPT, pengurangan dan tunggakan berpengaruh serentak terhadap penerimaan PBB.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas 655,56 km² dengan wilayah yang terletak di antara Gunung Merapi dan pegunungan seribu dengan ketinggian 75-160 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan 10 kelurahan dan 391 desa. Sehingga membuat Kabupaten Klaten memiliki potensi pembangunan yang tinggi.

Bukan itu saja, Kabupaten Klaten memiliki Pertanian, peternakan, serta beberapa lokasi wisata yang mendukung pendapatan daerah. Dari segi pajak pembangunan daerah tentunya keseluruhan aspek baik dari aspek luas wilayah, pembangunan daerah, proyek investasi, pertanian, serta objek wisata sangat mendukung bagi pembangunan daerah lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun berdasarkan fakta yang ada, data realisasi pada tahun 2018-2019 menunjukkan terjadi penurunan terhadap pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Ketika merujuk kepada luas bangunan, luas tanah serta jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berada di Kabupaten Klaten sendiri maka harusnya PBB berperan penting dalam pembanguan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, penelitian ini akan berpusat pada pengaruh jumlah sppt yang dikeluarkan, luas tanah serta luas bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klate tahun 2018-2019.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apakah jumlah SPPT yang ada mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten?
2. Apakah jumlah luas tanah mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten?
3. Apakah luas bangunan mempengaruhi besarnya penerimaan PBB di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah SPPT terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui pengaruh Luas Tanah terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui pengaruh Luas Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui besarnya penerimaan PBB yang dipengaruhi oleh faktor – faktornya yaitu Jumlah SPPT, Luas Tanah serta Luas Bangunan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi bagi pemerintahan Kabupaten Klaten serta pembaca yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan alat pengolahan data menggunakan *Eviews 8*. Widarjono (2016) mengungkapkan bahwa data panel ini digunakan pada penelitian dengan menggunakan data *time series* dan data *cross section*.

Dalam tehnik regresi data panel, model estimasi dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan (Widarjono, 2013), yaitu :

1. *Common Effect Model (CEM)* atau *Pooled Least Square (PLS)* yaitu tehnik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi data panel.
2. *Fixed Effect Model (FEM)* yaitu dalam model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.
3. *Random Effect Model (FEM)* yaitu tehnik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan

intersep. Pengertian ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara variabel namun intersepnya sama antar waktu (time variant).

Dalam pemilihan model yang tepat dalam pemilihan model estimasi, data panel memiliki model pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Setelah dilakukan pengujian untuk menentukan model estimasi, selanjutnya melakukan pengujian signifikansi menggunakan Uji Statistik.

Analisis regresi data panel dengan model estimasi sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 LB_{it} + \beta_2 LT_{it} + \beta_3 SPPT_{it} + \varepsilon$$

Dimana :

Y	= Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien
LB	= Luas Bangunan
LT	= Luas Tanah
$SPPT$	= Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

E.2. Data dan Sumber

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari Jumlah SPPT yang dikeluarkan, data Luas Tanah serta data Luas Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2018-2019. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori pajak dan hasil penelitian terdahulu tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang uraian alat dan model analisis serta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesis, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel serta sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis deskripsi daerah penelitian serta analisis data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek penelitian maupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**